

**EKONOMI RUMAH TANGGA, DISTRIBUSI PENDAPATAN
DAN KEMISKINAN DI DUA DESA DI JAWA TENGAH dan DIY:
Studi Kasus di Batur (Klaten) dan Semanu (Gunung Kidul)***

Tadjuddin Noer Effendi

Wini Tamtiari

Susi Eja Yuarsti

*Sukamtiningsih***

Abstract

This study examines the household economy, income distribution, extent of poverty, and factors that determine the poverty level of two villages in Central Java and Yogyakarta. By using data from household and industry surveys, this study found that lack of employment opportunities in the agricultural sector has forced many rural workers longing for non-farm employment, both in rural and urban areas.

Rural non-farm activities, especially rural industries, have a positive impact in reducing poverty both in less developed and in developed villages. As can be expected this study also found that poverty is more common in less developed than developed areas. However, inequality in income distribution is more pronounced in developed villages. This means that poverty and income distribution are quite different problems. Accordingly, solutions to these problems have to be different.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan pedesaan Jawa telah diperhatikan sejak awal abad 20 (de Vries, 1985). Sejak itu banyak penelitian dilakukan dalam upaya mencari sebab-sebab kemiskinan. Teori kemiskinan kontemporer pedesaan Jawa pada umumnya bersumber dari karya Geertz (1974) yang diangkat dari hasil penelitian keadaan pedesaan Jawa sesudah merdeka. Menurut dia,

meluasnya gejala kemiskinan di pedesaan Jawa merupakan akibat adanya proses involusi pertanian. Proses involusi pertanian adalah proses pertumbuhan tanpa diikuti perubahan, pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan ke dalam atau ekspansi horizontal. Sektor pertanian terus-menerus menyerap tambahan angkatan kerja tanpa diikuti perubahan

* Makalah ini menggunakan data hasil penelitian yang disponsori oleh USAID. Penelitian dilaksanakan atas kerja sama antara Tennessee State University, USA, dan Pusat Penelitian Kependudukan - UGM. Pengumpulan data dilakukan pada November 1992 sampai Februari 1993.

** Tadjuddin Noer Effendi, Ph.D, adalah staf peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar pada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Dra. Wini Tamtiari, Dra. Susi Eja Yuarsti, dan Dra. Sukamtiningsih adalah asisten peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

struktural. Akibatnya, mekanisme pembagian penghasilan diikuti oleh melanggengkan derajat homogenitas sosial ekonomi melalui pembagian penghasilan yang relatif kecil menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Gejala ini menimbulkan pemerataan kemiskinan (*shared poverty*) yang ditandai dengan meluasnya kemiskinan.

Sampai batas-batas tertentu teori Geertz ini dapat dibenarkan, namun mulai tahun 1970-an teori itu mendapat tanggapan dari beberapa pakar yang mengamati masalah kemiskinan pedesaan Jawa. Collier (1977) berpendapat bahwa teori Geertz dibangun hanya dari hasil pengamatan dan penelitian selama tahun 1952-1954. Pada saat itu ekonomi Indonesia umumnya dan pedesaan Jawa khususnya masih sangat parah sebagai akibat Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan yang baru berakhir pada tahun 1950. Aktivitas ekonomi belum berkembang dan desa-desa relatif terisolasi dan tertutup.

Sejak akhir tahun 1960-an desa-desa di Jawa mulai mengalami perkembangan yang pesat. Tampaknya teori Geertz yang dibangun berdasarkan realitas sosial 1950-an tidak pas lagi dengan kondisi tahun 1960-an. Meskipun kemiskinan masih meluas, diperkirakan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 53 juta (Booth dan Sundrum, 1983:57), tetapi beberapa program pembangunan pedesaan yang diprakarsai pemerintah meningkat dengan pesat dan menyebar ke seluruh pelosok desa. Teknologi baru dalam sektor pertanian diperkenalkan, prasarana transportasi diperbaiki, dan sarana sosial-ekonomi dibangun. Mulai saat itu terjadi perubahan sosial-

ekonomi di pedesaan Jawa. Sektor pertanian mengalami perubahan yang cukup berarti sejak ada program intensifikasi pertanian (revolusi hijau), meskipun di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah pertanian tadah hujan, belum ada perubahan dan kemajuan yang berarti.

Collier (1977) menemukan bahwa teknologi baru yang diperkenalkan di bidang pertanian cenderung mengandalkan pada masukan modern dan membatasi penggunaan pekerja. Patut diakui bahwa teknologi baru telah menaikkan hasil per unit masukan buruh, tetapi peluang kerja untuk penduduk miskin pedesaan cenderung berkurang; apalagi hubungan sosial tradisional (*patron dan klien*) yang berfungsi sebagai lembaga sosial dalam membagi-bagikan pekerjaan dan penghasilan antara petani kaya dan miskin telah memudar dan melonggar. Dapat dikatakan bahwa strategi pembangunan pedesaan yang diterapkan belum berdampak positif pada kemiskinan. Pada tahun 1976 diperkirakan penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sekitar 37 juta jiwa (Booth dan Sundrum, 1983: 57).

Pandangan Collier ini pun mengandung beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan adalah yang menyangkut perubahan lembaga sosial tradisional. Perubahan lembaga sosial tradisional, misalnya *bawon* ke *ceblokan* atau *kedokan* menurut Kolff (1936) telah terjadi di Jawa sejak tahun 1922. Artinya, teknologi baru yang diperkenalkan lewat revolusi hijau yang diduga Collier telah melonggarkan hubungan antara petani kaya dan petani gurem atau tunakisma sudah terjadi

sebelum teknologi baru diperkenalkan. Hal yang senada juga dilontarkan oleh Maurer (1984: 117). Maurer berkilah bahwa tebasan bukanlah hal yang baru di pedesaan Jawa. Tebasan sudah dikenal sebelum teknologi baru diperkenalkan dan tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa teknologi itu telah mengurangi peluang kerja. Secara lebih tegas Maurer (1984: 118) menulis bahwa,

"teknologi pertanian baru yang diperkenalkan di pedesaan Jawa belum tentu menyebabkan kurangnya peluang kerja seperti yang telah dikatakan Collier itu telah terjadi".

Kelemahan lain dari teori Collier adalah hipotesis tentang kemiskinan di Jawa berkaitan dengan polarisasi penguasaan lahan garapan. Petani gurem terpaksa/dipaksa menjual lahan garapan mereka pada petani kaya. Polarisasi itu diikuti oleh polarisasi ekonomi dan sosial, namun bukti-bukti yang ada tidak mendukung tentang adanya proses polarisasi itu. Data Sensus Pertanian tahun 1963 dan 1983 menunjukkan bahwa lahan yang dikuasai oleh rumah tangga tani tidak mengalami perubahan yang berarti dan tidak ada bukti-bukti tentang konsentrasi penguasaan lahan (Manning, 1985). Hasil penelitian Saefuddin dan Marisa (1984) di enam desa di Jawa juga menemukan bahwa tidak ada proses polarisasi penguasaan lahan seperti yang disinyalir oleh Collier. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa polarisasi sosial tidak terjadi di Jawa (sebagai contoh lihat Hayami dan Kikuchi, 1987; Amaluddin, 1987).

Dalam kaitannya dengan peluang kerja pertanian beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak ada bukti yang

sahih untuk menyimpulkan bahwa peluang kerja di sektor pertanian telah menurun (Jones, 1984; World Bank, 1985; Manning, 1986). Diakui dalam periode 1971-1980 angkatan kerja yang diserap sektor pertanian relatif kecil daripada periode 1961-1971. Memang ada kecenderungan bahwa teknologi baru telah mempersempit peluang kerja perempuan pedesaan di sektor pertanian, tetapi peluang kerja perempuan di luar sektor pertanian telah meningkat (Mather, 1983; Oey, 1985). Budiono (1982) dan Booth (1977) berpendapat bahwa peluang kerja di sektor pertanian telah meningkat bersamaan dengan meluasnya pembangunan irigasi. Hanya saja pertambahan itu tidak secepat pertumbuhan angkatan kerja sebagai akibat tingginya angka kelahiran pada tahun 1960-an. Pandangan ini menekankan bahwa kemiskinan pedesaan Jawa erat kaitannya dengan masalah kependudukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan sumber-sumber yang ada (lahan pertanian) dan pekerjaan tidak cukup untuk mendukung kehidupan penduduk (Singarimbun dan Penny, 1976). Meskipun demikian, menurut Penny (1990), kemiskinan di Jawa tidak semata-mata karena tekanan penduduk pada lahan pertanian, tetapi berkaitan dengan meluasnya sistem pasarisasi atau komersialisasi.

Komersialisasi atau pasarisasi diduga membawa akibat negatif terhadap subsistensi ekonomi pedesaan. Ada kecenderungan masyarakat desa segera menjual hasil (produksi) ke pasar dalam rangka mendapat uang kontan yang dibutuhkan untuk kebutuhan konsumtif sekunder. Akibatnya, mereka tidak

mempunyai cadangan untuk subsisten, sehingga kebutuhan pangan ditentukan oleh pasar. Dalam beberapa kasus harga pasar cenderung lebih tinggi daripada harga jual petani. Keadaan ini menyebabkan nilai tukar rendah karena pendapatan rendah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup biasanya mereka berusaha mencari uang kontan dengan bekerja di luar sektor pertanian.

Menurut Manning (1988) pada umumnya angkatan kerja itu mencari kerja ke kota karena permintaan angkatan kerja meningkat dengan pesat seiring dengan pesatnya pembangunan di kota. Bonanza minyak yang terjadi pada akhir 1970-an turut menyumbang pada terbukanya peluang kerja di kota. Beberapa penelitian (lihat misalnya Hugo, 1978; Mantra 1981) menemukan bahwa angkatan kerja pedesaan banyak yang bekerja di kota dan masih berhubungan dengan daerah asal melalui migrasi sirkuler. Pada waktu-waktu tertentu mereka terlibat dalam aktivitas pertanian. Tampaknya bekerja di kota dan mengombinasikan penghasilan antara pertanian dan luar pertanian merupakan salah satu strategi rumah tangga pedesaan untuk keluar dari kemelut kemiskinan (Hart, 1986).

Beberapa studi (lihat misalnya Manning, 1988) menemukan bahwa strategi itu membawa dampak positif terhadap ekonomi rumah tangga pedesaan. Beberapa penelitian (Hartoyo dan Soentoro, 1980; Husken, 1989; White dan Wiradi, 1989) menemukan bahwa kesempatan peluang kerja luar pertanian telah menyehatkan adanya ketimpangan distribusi penghasilan pedesaan. Ada kecenderungan rumah tangga petani atau penduduk kaya pedesaan mampu

menginvestasikan modal mereka pada kegiatan *non-farm* yang dapat mendatangkan keuntungan besar, sedang rumah tangga atau petani miskin yang memiliki modal terbatas (kecil) hanya dapat menginvestasikan modal mereka pada kegiatan *non-farm* yang tidak mendatangkan keuntungan atau keuntungannya kecil (White, 1986; Effendi, 1991). Mereka yang tidak memiliki modal sama sekali tetap bertahan di sektor pertanian sebagai buruh atau menggarap tanah pertanian yang semakin kecil (fragmentasi) dengan penghasilan yang rendah. Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga pedesaan Jawa berusaha mengatasi kemiskinan dengan mengombinasikan penghasilan dari pertanian dan nonpertanian. Diduga ketimpangan distribusi penghasilan dan kemiskinan pedesaan Jawa berkaitan dengan adanya perbedaan kesempatan dalam meraih peluang berusaha dan kerja. Berdasarkan asumsi di atas, studi ini berusaha: (1) menelaah kegiatan ekonomi rumah tangga di dua desa penelitian (di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta); (2) menelaah distribusi pendapatan dan derajat kemiskinan di dua desa penelitian serta pengaruh sumber-sumber penghasilan pada derajat kemiskinan.

Konsep dan Pendekatan Pengukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik (Ellis, 1984). Oleh karena itu, ada berbagai macam konsep dan definisi kemiskinan (Andre Bayo Ala, 1981). Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan

dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek-aspek nonmaterial. Tidak mengherankan bila ada berbagai macam pendekatan untuk mengukur kemiskinan (Scott, 1981).

Menurut Friedman (1981: 140) secara garis besar pendekatan pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, pendekatan *poverty threshold* (ambang batas kemiskinan). Pendekatan ini menekankan pada tingkat hidup seseorang untuk hidup dan mempertahankan diri untuk hidup. Menurut pendekatan ini, kemiskinan diukur dengan melihat berapa proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nilai (ambang) batas kemiskinan dapat diukur dengan kebutuhan fisik minimum. Ukuran ini sering disebut dengan ukuran kemiskinan absolut (Scott, 1981: 13).

Kedua, pendekatan *reciprocal entitlement*. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan merupakan cerminan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial tidak terbatas pada modal yang produktif atau aset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dll), tetapi juga meliputi sumber-sumber keuangan (penghasilan dan kredit), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, koperasi, dsb.), jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ukuran yang dipakai untuk menentukan kemiskinan ini adalah ketersediaan fasilitas/sarana sosial per kapita.

Artinya, pendekatan ini menekankan pada distribusi kebutuhan nyata per kapita setiap sumber daya (pendidikan, kesehatan, perumahan, dll.) dalam satu masyarakat dibandingkan dengan masyarakat lain atau dengan ukuran baku. Ukuran ini disebut dengan ukuran kemiskinan relatif.

Dalam studi ini kemiskinan relatif dianalisis dengan menggunakan kurva Lorenz (distribusi pendapatan) dan rasio gini, sedangkan kemiskinan absolut diukur menggunakan data pendapatan rumah tangga. Pendekatan ini dapat memberikan informasi sumber-sumber penghasilan rumah tangga. Dengan demikian, dapat ditelusuri sumber penghasilan yang memberikan sumbangan berarti bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga pedesaan. Informasi ini antara lain dapat dipakai sebagai acuan-ancuan dalam menentukan intervensi pengentasan kemiskinan.

Desa Penelitian

Kondisi pedesaan Jawa bervariasi, baik dari segi lokasi, latar belakang sejarah, perkembangan ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, untuk mengkaji ekonomi rumah tangga dan kemiskinan perlu mempertimbangkan unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, situasi tiap desa penelitian menjadi penting ditelaah. Ulasan berikut memaparkan situasi daerah penelitian.

Dua desa yang dipilih sebagai daerah penelitian mempunyai perbedaan, baik dari segi lokasi, latar belakang sejarah, maupun perkembangan ekonomi dan sosial. Sengaja diambil desa dengan latar belakang berbeda agar dapat diketahui apakah ada perbedaan distribusi pendapatan dan kemiskinan antara desa yang maju dan relatif kurang maju.

Asumsi yang diajukan dalam pengambilan daerah penelitian yang berbeda adalah bahwa desa dengan daerah belakang (*binterland*) lebih maju, kesempatan-kesempatan peluang berusaha dan kerja lebih luas dibandingkan dengan desa yang daerah belakang relatif kurang maju. Berarti, di desa maju kemiskinan relatif rendah bila dibandingkan dengan desa kurang maju.

Batur adalah desa yang tergolong maju,* terletak di daerah dataran rendah padi sawah Klaten. Hampir tidak berbeda dengan daerah dataran rendah di Jawa, Batur dapat dialiri pengairan irigasi sepanjang tahun. Tidak mengherankan bila pertanian padi dapat diusahakan secara intensif sepanjang tahun. Usaha pertanian bersifat monokultur (padi) diselingi dengan tanaman tebu. Tanaman tebu diusahakan berdasarkan atas permintaan perkebunan tebu yang ada di daerah ini. Dalam beberapa aktivitas usaha pertanian, di Batur telah diterapkan teknologi maju. Dapat dikatakan bahwa Desa Batur didukung oleh daerah belakang pertanian relatif maju, namun pemilikan tanah di desa ini relatif tidak merata dengan nilai rasio gini sekitar 0,7874.

Berbeda dengan Batur, Desa Semanu terletak di daerah dataran tinggi (Pegunungan Sewu) Jawa bagian selatan. Seperti halnya di kebanyakan dataran tinggi di Jawa, usaha pertanian sangat tergantung pada air hujan. Oleh

karena itu, tanaman padi hanya diusahakan sekali setahun. Usaha pertanian di daerah ini adalah tanaman campuran (sistem 'tumpang sari') dengan tanaman utama tanaman pangan, seperti ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan kedelai. Teknologi yang digunakan dalam aktivitas pertanian masih didominasi teknologi tradisional. Ciri-ciri keterbelakangan daerah belakang Semanu masih cukup menonjol bila dibandingkan dengan Desa Batur. Dibandingkan dengan Batur, distribusi pemilikan tanah pertanian relatif baik dengan nilai rasio gini sekitar 0,6095.

Perbedaan kondisi daerah belakang berkaitan dengan keadaan demografi di kedua desa. Seperti di kebanyakan daerah dataran rendah di Jawa, kepadatan penduduk Batur tergolong tinggi sekitar 2717 jiwa per km². Angka ini sekitar 4 kali lipat angka kepadatan penduduk Semanu yang hanya 719 jiwa per km².** Tingginya angka kepadatan penduduk di Batur tampaknya berhubungan dengan adanya arus migrasi masuk ke daerah ini. Hal ini tercermin dari tingginya angka pertumbuhan penduduk Desa Batur, yaitu sekitar 1,18 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Daerah Semanu cenderung sebagai daerah pengirim migran. Migrasi keluar cenderung tinggi dari daerah Semanu. Tidak mengherankan bila pertumbuhan penduduk Semanu tercatat sekitar 0,39

* Ternyata, sifat sektor ekonomi di Ceper, termasuk penggunaan mesin-mesin masih tetap rendah. Hanya jika dibandingkan dengan keadaan di Semanu sektor industri di Ceper dapat dinilai relatif maju.

** Kepadatan penduduk Jawa pada tahun 1990 sekitar 813 jiwa per km².

persen per tahun dalam periode 1980-1990.*

Besarnya arus migrasi masuk ke Batur berkaitan dengan tersedianya peluang kerja pada industri-industri di daerah ini, yang merupakan daya tarik. Di Batur ada beberapa industri skala besar, terutama industri cor logam, yang dapat menyerap tenaga kerja. Artinya, industri di Batur telah berkembang pada tingkat yang lebih maju bila dibandingkan dengan industri yang ada di Semanu. Agaknya kebutuhan pekerja yang bersedia dibayar murah tidak dapat dicukupi oleh angkatan kerja yang tersedia di Batur. Tingginya upah pekerja yang berasal dari daerah sekitarnya menyebabkan terjadinya 'import' tenaga kerja yang murah dari daerah-daerah miskin, terutama dari daerah Pacitan (Jawa Timur), Purwodadi (Jawa Tengah), dan Gunung Kidul.** Sebaliknya, besarnya arus migrasi keluar dari Semanu selain alasan pertanian yang masih tradisional, juga industri masih bersifat industri rumah tangga. Pada umumnya industri di Semanu mempekerjakan tenaga kerja keluarga dan berskala kecil. Industri di Semanu belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Hal ini tercermin dari proporsi angkatan kerja yang bekerja di industri, tercatat di Batur

ada 25 untuk 100 orang angkatan kerja, sedang di Semanu hanya 2.

Meskipun dari segi transportasi dan kemudahan berhubungan dengan daerah luar di kedua desa penelitian tidak jauh berbeda, kegiatan ekonomi Batur dapat dikatakan lebih maju bila dibandingkan dengan Semanu. Di Batur perdagangan tampak lebih hidup. Di Batur warung-warung yang menjajakan kebutuhan masyarakat tampak lebih banyak bila dibandingkan dengan Semanu. Jasa pendukung kegiatan ekonomi, seperti bank, usaha transportasi, dan pasar tersedia di Batur. Di Semanu fasilitas itu tersedia di ibu kota kabupaten (Wonosari) yang jaraknya sekitar 15 km dari Semanu.

Jumlah rumah tangga di Batur 772 dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,8 jiwa. Di Semanu jumlah rumah tangga 2725 dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,3. Dari jumlah rumah tangga itu dipilih sampel secara acak sebanyak 100 rumah tangga di tiap desa. Sampel dipilih dengan menggunakan bilangan acak. Dari 100 rumah tangga di tiap desa diambil 50 rumah tangga tani dan 50 rumah tangga nontani. Pengumpulan data dilakukan secara intensif selama kurang lebih 4 bulan. Para peneliti tinggal di desa dan berusaha memahami sedekat mungkin

* Meskipun dua daerah mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup berbeda, pertumbuhan tersebut baik di Ceper maupun di Semanu masih jauh di bawah pertumbuhan rata-rata untuk Indonesia keseluruhannya yang mencapai kurang-lebih 2 persen pada dekade lalu.

** Hal ini memang menarik karena konsep 'faktor keunggulan komparatif' ternyata tidak berlaku untuk tingkat internasional saja, tetapi juga nasional. Perbedaan antara upah pekerja dari daerah miskin dan daerah lebih maju sekaligus mendorong persaingan antara para pekerja, yang melemahkan posisi tawar-menawar bagi mereka dalam menentukan upah.

persoalan yang diteliti. Memahami perilaku ekonomi rumah tangga bukanlah hal yang mudah, kemungkinan penyimpangan tidak dapat dielakkan dalam pengumpulan data.

Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga

Kegiatan ekonomi rumah tangga pedesaan Jawa sangat beragam. Kepala keluarga, istri, dan anak mengerjakan berbagai macam pekerjaan (White, 1986). Pola yang sama ditemui di Batur dan Semanu. Di Batur kepala keluarga yang bekerja (pekerjaan pokok) di bidang pertanian saja hanya sekitar 26 persen dan sekitar 72 persen bekerja di luar kegiatan pertanian (*non-farm*) (lihat Tabel 1). Kegiatan nonpertanian yang dimasuki adalah industri sekitar 44 persen, perdagangan 12 persen, dan jasa 9 persen. Ada 2 persen yang tidak bekerja karena sudah tua.

Di Batur istri dan anak yang bekerja sebagian besar bekerja di luar sektor pertanian dan hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor pertanian. Kegiatan nonpertanian yang paling banyak dimasuki para ibu rumah tangga adalah perdagangan dan jasa. Di Batur anak yang masih menjadi tanggungan keluarga yang bekerja di industri relatif besar, tetapi ada juga yang terlibat di perdagangan dan jasa.

Di Semanu kepala keluarga yang terlibat dalam kegiatan pertanian lebih besar (sekitar 49 persen) bila dibandingkan dengan di Batur. Selain pertanian sekitar 51 persen terlibat di luar pertanian. Kegiatan *non-farm* yang tergolong besar dimasuki adalah sektor jasa sebanyak 15 persen, perdagangan 14 persen, yang menjadi karyawan 12 persen, sebagai pengrajin 6 persen, dan industri 3 persen.

Tabel 1.
Kegiatan Kepala Keluarga, Istri dan Anak di Batur dan Semanu

Jenis Kegiatan	Batur (%)			Semanu (%)		
	KK	Istri	Anak	KK	Istri	Anak
Pertanian	26	19,6	3,7	49	60,8	19,2
Nonpertanian	72	53,2	34,2	50	30,9	12,5
Industri	44	6,5	12,6	9	9,3	7,3
Perdagangan	12	34,8	7,9	14	20,6	-
Jasa	9	10,9	7,4	15	-	2,6
Karyawan	7	1,1	6,3	12	1,0	2,6
Mencari Pekerjaan	-	-	3,2	1*	-	2,0
Tidak Bekerja	2**	27,2	6,8	-	8,2	1,3
Sekolah	-	-	52,1	-	-	64,9
Jumlah	%	100	100	100	100	100
	N	100	92	100	97	151

Sumber: Survei Rumah Tangga, Batur dan Semanu, 1993

* Semula R sebagai pedagang, sewaktu diwawancara tidak bekerja karena dagangannya tidak laku.

** R berusia tua, tidak kuat bekerja lagi.

Tidak seperti di Batur, di Semanu ibu rumah tangga dan anak yang bekerja di sektor pertanian relatif besar. Perdagangan, industri, dan kerajinan adalah kegiatan nonpertanian yang dimasuki oleh para ibu dan anak.

Mengapa proporsi rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan pertanian relatif rendah, terutama di Batur? Selah lahan pertanian mulai terbatas, petani sering mengalami kekurangan air* meskipun sudah dialiri irigasi. Beberapa responden mengatakan bahwa setiap akan menggarap lahan mereka berusaha mencari tambahan air. Setiap membutuhkan tambahan air mereka harus menghubungi pembantu tani desa dan diperlukan tambahan biaya. Penambahan biaya ini sangat dirasakan bagi petani penggarap karena semua biaya pengolahan, termasuk biaya mendapatkan tambahan air ditanggung oleh penggarap. Pemilik tanah pertanian, yang umumnya adalah para pengusaha industri, tidak tahu menahu tentang tambahan biaya untuk tambahan air. Setiap patok lahan dengan ukuran rata-rata 2250 m² membutuhkan biaya sebanyak Rp 2.000,00 untuk sekali mengairi. Hal ini menyebabkan penghasilan dari pertanian relatif rendah. Seorang responden mengatakan bahwa setiap musim dia selalu menyediakan uang sebesar Rp 6.000,00 untuk cadangan membeli air. Selain menyediakan uang, dia juga harus cekatan menghubungi pembantu tani desa jika sewaktu-waktu membutuhkan tambahan air. Seandainya ia terlambat sedikit saja menghuhungi petugas

tersebut, pengairan akan terganggu sebab petugas tidak mau lagi menghubungi si pemilik air. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi dan pada gilirannya bisa merugikan.

Masalah pertanian di Batur berbeda dengan di Semanu. Seperti disebutkan pada uraian di bagian terdahulu, petani di Semanu membutuhkan air hujan untuk kegiatan pertanian. Ketergantungan pada musim ini menyebabkan hasil pertanian tidak dapat dipastikan. Penyimpangan musim (*salah mongso*) apakah hujan datang lebih awal atau terlambat sangat berpengaruh pada pertanian. Rumah tangga petani sering mengalami kegagalan panen karena adanya penyimpangan musim. Pada musim tanam yang lalu karena frekuensi hujan tinggi, beberapa petani mengalami kerugian. Seorang responden mengatakan,

"Pada musim kemarin saya mengalami kerugian (menurut penghitungan kerugian sebesar Rp 194.400,00) karena *salah mongso* (salah dalam perhitungan musim). Pada waktu itu saya menanam padi, tetapi ternyata hujan tidak seperti yang diharapkan (terlalu banyak hujan) sehingga tanaman padi *gabug* (tidak berisi)".

Ketidakpastian hasil pertanian mendorong rumah tangga di Semanu berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan mengombinasikan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan ekonomi di luar pertanian, baik yang dilakukan di desa maupun di luar desa.** Bahkan heberapa kepala

* Gejala yang sama ditemui Singarimbun (1990) di Sriharjo.

** Hart (1986) dan White (1989) menemukan pola yang sama di beberapa desa Jawa.

Tabel 2.
Rata-Rata Hari Kerja Per Tahun di Sektor Pertanian dan Nonpertanian Kepala Keluarga, Istri, dan Anak di Batur dan Semanu

Status Keluarga/Kegiatan	Hari Kerja/Tahun	
	Batur	Semanu
Kepala Keluarga	(N=180)	(N=82)
Pertanian*	64,2	68,2
Nonpertanian	255,9	247,2
Istri	(N=43)	(N=31)
Pertanian	70,8	72,2
Nonpertanian	266,5	274,5
Anak	(N=58)	(N=17)
Pertanian	55,0	37,2
Nonpertanian	278,8	295,2

Sumber: Survei Rumah Tangga, Batur dan Semanu, 1993

* Catatan rata-rata jam kerja pertanian di Semanu 5,8 jam dan di Batur 5,3 jam per hari.

keluarga hanya terlibat dalam kegiatan pertanian pada saat musim tanam atau panen.

Tidak mengherankan bila curahan hari kerja dalam setahun untuk sektor pertanian relatif sedikit. Dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan pekerjaan sambilan (*part time farming*) di kedua desa penelitian.* Tabel 2 memuat curahan hari kerja setahun di kedua desa penelitian. Baik di Batur maupun di Semanu, curahan bari kerja dalam bidang pertanian hanya berkisar antara 37 sampai 75 hari setahun. Tampaknya, kaum ibu lebih banyak mencurahkan waktu dalam bidang pertanian dibandingkan dengan suami dan anak. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan

pertanian dipandang sebagai kegiatan sekunder atau sumber pendapatan kedua rumah tangga sehingga curahan waktu ibu rumah tangga lebih banyak, sedang kepala rumah tangga banyak mencurahkan waktu dalam kegiatan nonpertanian yang dipandang sebagai pendapatan utama atau pokok.

Tidak seperti diduga semula, di kedua desa penelitian kepala keluarga, istri, dan anak yang bekerja di sektor nonpertanian di kota proporsinya relatif kecil (Tabel 3). Kehanyakan pekerjaan nonpertanian dilakukan di desa. Hal ini agaknya berkaitan dengan tersedianya peluang kerja nonpertanian di kedua desa penelitian. Adanya peluang kerja nonpertanian di kedua desa penelitian mungkin telah mengurangi keinginan mereka untuk bekerja di kota.**

Tabel 3
Lokasi Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga, Istri, dan Anak di Batur dan Semanu

Status/lokasi	Batur	Semanu
Kepala Keluarga	(N=98)	(N=99)
Desa ini	84,7	78,8
Desa lain	13,3	19,2
Kota	2,0	2,0
Istri	(N=67)	(N=89)
Desa ini	80,6	96,6
Desa lain	13,4	3,4
Kota	6,0	-
Anak	(N=72)	(N=48)
Desa ini	79,2	87,5
Desa lain	18,1	12,5
Kota	2,8	-

Sumber: Survei Rumah Tangga, di Batur dan Semanu, 1993

* Schrevel (1989: 47) dalam penelitian di Desa Cidurian menemukan bahwa di desa itu kegiatan pertanian merupakan kegiatan sambilan (*part time farming*) juga.

** Dampak positif peluang kerja nonpertanian terhadap pengurangan arus migrasi ke kota antara lain dibahas oleh Hara (1981) dan Khada (1982).

Tabel 4
Jenis Industri Di Batur Dan Semanu

Jenis Industri	Batur (%)	Semanu (%)
Pengolahan makanan*	20	26
Anyaman-kerajinan dll**	5	57
Pande besi	2	15
Cor logam	29	-
Batu bata, genting, tapel	29	2
Tekstil	15	-
Jumlah %	100	100
N	100	100

Sumber: Data Survei Industri, 1993

- * Termasuk industri pengolahan makanan adalah pembuatan tempe, tahu, emping belinjo, roti, mie, krupuk/karak, dan criping pisang.
- ** Termasuk industri kerajinan adalah pembuatan sangkar burung, gamelan, besek, caping, kipas, pigura, mainan anak-anak dari kayu/kaleng.

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa peluang kerja industri tampak lebih menonjol di Batur daripada di Semanu. Di Batur kegiatan industri didominasi cor logam, batu bata, genting dan tapel (eetakan untuk cor logam), serta industri pengolahan makanan (lihat Tabel 4). Pemasaran hasil industri di Batur tidak hanya melayani kebutuhan lokal-regional, tetapi juga nasional.

Industri di Semanu kebanyakan adalah industri kerajinan bambu, pengolahan makanan, dan pande besi. Pada umumnya hasil industri dari Semanu hanya dipasarkan di pasar lokal dan regional. Segi teknologi yang dipakai di kedua daerah sangat berbeda. Di Semanu teknologi industri masih sangat sederhana, sebagian besar masih dikerjakan dengan tangan dan dikerjakan secara sambilan (*part time*).

Di Batur mayoritas industri menggunakan teknologi relatif maju dibandingkan dengan industri di Semanu. Sebagian besar pekerjaan industri di Batur telah menggunakan mesin dan mempunyai jam kerja teratur serta dikerjakan secara penuh (*full time*). Apakah perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ada perbedaan dalam distribusi pendapatan dan derajat kemiskinan di dua desa penelitian?

Distribusi Pendapatan

Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Studi ini menggunakan rasio gini dan kurva Lorenz dalam analisis. Kedua cara ini paling banyak dipakai dalam mengukur distribusi pendapatan. Dalam analisis distribusi pendapatan dicoba menelaah berdasarkan sumber penghasilan rumah tangga total, pertanian dan nonpertanian. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran sumbangan tiap sumber penghasilan pada distribusi pendapatan rumah tangga.

Gambar 1 memuat kurva Lorenz dan rasio gini penghasilan total rumah tangga, baik nonpertanian maupun pertanian, di Batur dan Semanu. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa di Batur distribusi penghasilan relatif timpang bila dibandingkan dengan di Semanu. Tampaknya, di daerah yang relatif maju dan angkatan kerja yang bekerja di nonpertanian relatif besar, distribusi pengbasilan cenderung timpang, sedang di daerah yang kurang maju distribusi pendapatan relatif merata.

Bila hanya memperhatikan sumber penghasilan nonpertanian, tampak distribusi penghasilan di Batur semakin

timpang. Namun distribusi penghasilan tampak agak membaik bila hanya memperhatikan penghasilan dari pertanian; sedangkan di Semanu bila distribusi penghasilan hanya menghitung penghasilan nonpertanian, ada kecenderungan distribusinya tidak baik. Cukup menarik bila distribusi penghasilan hanya memasukkan penghasilan dari pertanian, ada kecenderungan distribusi membaik.

Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi di atas. Pertama, penghasilan dari nonpertanian cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi penghasilan. Kedua, penghasilan dari pertanian dapat memperbaiki struktur distribusi pendapatan. Meskipun demikian, penghasilan dari pertanian cenderung memeratakan kemiskinan daripada memeratakan kekayaan. Ini mengarahkan pada kesimpulan umum bahwa kemiskinan cenderung tinggi di daerah yang rumah tangga hanya mengandalkan sumber penghasilan pada pertanian saja, sedang di daerah yang rumah tangga banyak mengandalkan sumber penghasilan pada nonpertanian kemiskinan relatif rendah, tetapi distribusi penghasilan relatif timpang. Isu ini dibahas di bagian berikut dengan menelaah pengaruh berbagai sumber penghasilan rumah tangga pada derajat kemiskinan.

Derajat Kemiskinan

Telah disebutkan di bagian kedua bahwa pendekatan yang digunakan

dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan *poverty threshold*. Untuk menentukan nilai ambang batas kemiskinan digunakan metode yang dikembangkan oleh Sayogyo (1986). Meskipun metode ini telah banyak dikritik (lihat misalnya Booth dan Sundrum, 1983: 58-60), sampai saat ini masih tetap dipakai karena data yang dibutuhkan untuk pengukuran tidak kompleks. Menurut metode ini ukuran garis kemiskinan di pedesaan setara dengan nilai 320 kg beras per kapita per tahun.

Di Batur proporsi penduduk yang tergolong miskin relatif kecil bila dibandingkan dengan di Semanu. Dari hasil survai diperoleh data bahwa di Batur, proporsi rumah tangga miskin ada 14 persen, sedangkan di Semanu ada 21 persen. Seperti telah diduga sebelumnya, di daerah yang relatif maju (Batur) kemiskinan relatif rendah, tetapi ada ketimpangan dalam distribusi penghasilan. Sebaliknya, di daerah relatif kurang maju (Semanu) proporsi penduduk miskin relatif besar, meskipun distribusi pendapatan relatif merata.

Tabel 5 memuat pengaruh pengurangan berbagai sumber penghasilan terhadap derajat kemiskinan di kedua desa penelitian. Tampak bahwa sumbangan penghasilan istri dan anak berpengaruh pada derajat kemiskinan. Tanpa penghasilan istri, rumah tangga yang tergolong miskin sekitar 26 persen, baik di Batur maupun

* Suyono dan Birowo (1976: 26-29) dari hasil penelitian di 8 desa di Jawa Tengah menemukan bahwa distribusi pendapatan cenderung membaik bila hanya memasukkan penghasilan dari pertanian dengan rasio gini 0,564.

di Semanu. Fola hampir sama bila penghasilan anak dikeluarkan.

Tabel 5
Pengaruh Pengurangan Penghasilan Terhadap
Derajat Kemiskinan di Batur dan Semanu

Sumber penghasilan	Proporsi rumah tangga miskin	
	Batur	Semanu
Tanpa nonpertanian	88	82
Tanpa industri	45	33
Tanpa jasa	25	36
Tanpa perdagangan	25	33
Tanpa penghasilan istri	26	26
Tanpa penghasilan anak	24	23
Tanpa kiriman anak	15	23

Sumber: Survei Rumah Tangga, Batur dan Semanu, 1993

Di kedua desa penelitian proporsi penduduk miskin mencapai lebih dari tiga perempat bila sumber penghasilan dari nonpertanian dikeluarkan dari penghasilan total rumah tangga. Ini berarti sumbangan penghasilan dari nonpertanian cukup berarti bila dibandingkan dengan penghasilan dari pertanian dalam menurunkan kemiskinan di kedua desa penelitian.

Meskipun penghasilan dan upah buruh industri di kedua desa penelitian hanya dapat mencukupi 80 persen dari Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) pekerja lajang (Effendi dan Weber, 1993), sumber penghasilan dari industri tampak cukup berpengaruh pada derajat kemiskinan. Bila penghasilan industri dikeluarkan dari penghasilan rumah tangga tampak sekitar 45 persen tergolong miskin di Batur. Di Semanu angka ini tercatat sekitar 33 persen. Selain upah, perbedaan struktur industri di Batur dan Semanu dapat membantu menjelaskan perbedaan itu.

Cukup menarik karena industri di Semanu belum berkembang seperti di Batur, sumbangan dari kegiatan jasa, perdagangan, dan kiriman anak cukup menonjol di Semanu.

Kegiatan nonpertanian yang bagaimana dimasuki rumah tangga miskin dan tidak miskin? Tampaknya di kedua desa penelitian rumah tangga miskin, baik kepala rumah tangga, istri, maupun anak cenderung memasuki pekerjaan nonpertanian berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata penghasilan bersih yang diperoleh dari kegiatan nonpertanian (lihat Tabel 6); sedang rumah tangga tidak tergolong miskin cenderung terlibat pada kegiatan nonpertanian berpenghasilan tinggi. Perbedaan inilah yang menyebabkan ketimpangan distribusi penghasilan semakin menajam, terutama di Batur.

Bagaimana ciri-ciri rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin di dua desa penelitian? Ciri agak menonjol yang membedakan keduanya adalah tingkat pendidikan (terutama kepala keluarga) dan luas pemilikan /penguasaan tanah. Pada Tabel 7 tampak bahwa kepala keluarga dari rumah tangga miskin di dua desa penelitian rata-rata berpendidikan tidak tamat SD (kelas 2-3), sedang untuk rumah tangga tidak miskin rata-rata berpendidikan tamat Sekolah Dasar.

Di samping itu, Tabel 7 juga memperlihatkan bahwa rata-rata pemilikan tanah pada rumah tangga tidak miskin di Batur lebih dari tiga kali luas pemilikan tanah pada rumah tangga miskin. Di Semanu rata-rata pemilikan tanah pada rumah tangga tidak miskin adalah dua kali luas pemilikan tanah pada rumah tangga miskin. Dengan

Tabel 6
Rata-Rata Penghasilan Bersih dari Kegiatan Nonpertanian
Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin di Batur dan Semanu

Status rumah tangga	Rata-rata penghasilan bersih (dalam ribuan rupiah per tahun)					
	Batur			Semanu		
	X	Sd	N	X	Sd	N
Miskin						
Suami	403	308	9	390	272	11
Istri	168	125	4	5	5	1
Anak	389	183	6	364	358	4
Tidak miskin						
Suami	5128	19477	68	1545	1953	67
Istri	928	1083	45	923	1093	29
Anak	1980	5046	34	1136	1413	72

Sumber: Survei Rumah Tangga, Batur dan Semanu, 1993

Tabel 7
Ciri-Ciri Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pemilikan Tanah

	Tingkat pendidikan		Pemilikan tanah (m ²)	
	Batur	Semanu	Batur	Semanu
Miskin	2	3	540	2821
Tidak miskin	7	6	1811	5750

Sumber: Survei Rumah tangga, Batur dan Semanu, 1993

demikian, dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat pendidikan dan luas pemilikan tanah pada rumah tangga miskin di dua desa penelitian relatif lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

Kesimpulan

Studi ini telah berusaha membandingkan kegiatan ekonomi rumah tangga, distribusi penghasilan dan kemiskinan di dua desa yang mempunyai perbedaan latar belakang. Ternyata perbedaan itu tidak menunjukkan adanya perbedaan kegiatan ekonomi rumah tangga. Di kedua desa, pertanian tidak menjadi sumber

penghasilan utama lagi. Hal ini tercermin dari waktu yang dicurahkan pada kegiatan pertanian hanya sekitar 2,5 bulan dalam setahun dan sumbangannya terhadap penghasilan rumah tangga relatif kecil. Di kedua desa itu curahan waktu kaum perempuan (istri) dalam kegiatan pertanian lebih banyak daripada laki-laki (kepala rumah tangga). Tugas mengelola kegiatan pertanian tampaknya diambil alih para perempuan (istri); sementara itu, kaum lelaki, yang sebagian besar kepala rumah tangga, terlibat dalam kegiatan non-pertanian. Mengombinasikan penghasilan pertanian dan nonpertanian merupakan strategi rumah tangga di

kedua desa penelitian untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Sumber penghasilan dari non-pertanian memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap derajat kemiskinan di kedua desa penelitian. Bila sumber penghasilan dari nonpertanian dikeluarkan dari penghasilan total rumah tangga maka derajat kemiskinan di kedua desa mencapai sekitar 80 persen. Kegiatan nonpertanian yang memberikan sumbangan cukup berarti adalah industri. Tanpa penghasilan dari industri sekitar sepertiga rumah tangga di kedua daerah penelitian hidup di hawah garis kemiskinan.

Ada perbedaan distribusi penghasilan dan kemiskinan di dua desa penelitian. Di desa yang lebih maju persoalan yang dihadapi bukan kemiskinan, melainkan ketimpangan distribusi penghasilan. Di desa relatif kurang maju kemiskinan lebih menjadi masalah daripada ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi penghasilan dan kemiskinan ini tampaknya berkaitan dengan perbedaan kesempatan dalam meraih peluang berusaha dan bekerja antara golongan miskin dan kaya. Agaknya rumah tangga miskin karena tidak mempunyai modal, keterampilan, jaringan sosial dan kekuasaan sosial, akses untuk investasi atau meraih peluang berusaha dan kerja terbatas pada pekerjaan nonpertanian yang berpenghasilan rendah. Sebaliknya, golongan kaya cenderung masuk pada kegiatan nonpertanian yang mendatangkan penghasilan besar sebab mereka mempunyai modal dan kemudahan-kemudahan untuk investasi atau meraih peluang berusaha dan kerja di kegiatan nonpertanian yang mendatangkan keuntungan besar. Perbedaan inilah yang menyebabkan ketimpangan

distribusi penghasilan dan langgengnya kemiskinan di pedesaan.

Melihat kenyataan ini tentunya intervensi pembangunan di kedua daerah penelitian harus berbeda. Di daerah relatif maju (Batur) diperlukan intervensi yang dapat membantu dalam pemerataan penghasilan, sedang di daerah relatif kurang maju (Semau) perlu dipikirkan kebijakan yang dapat mengurangi penduduk yang miskin. Melihat potensi ekonomi rumah tangga, sumber penghasilan dan pengaruhnya pada derajat kemiskinan, tampaknya dalam pengentasan kemiskinan pedesaan perlu dipikirkan program yang dapat menciptakan peluang berusaha dan kerja di luar pertanian. Kebijakan perlu diikuti dengan mempertimbangkan potensi masing-masing desa dan rumah tangga serta memberikan akses lebih besar pada rumah tangga miskin.

Daftar Pustaka

- Amaluddin, Moh. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Andre Bayo Ala (ed). 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Booth, Annc. 1977. "Irrigation in Indonesia Part II", *BIES*, 13(2): 45-77.
- Booth, Anne dan RM. Sundrum. 1983. "Distribusi Pendapatan" dalam *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*, H. W. Arndt Jakarta, LP3ES: 48-95.
- Budiono dkk. 1982. *Technological Change, Productivity and Employment in Indonesian Agriculture: an Analysis of Annual Agricultural Surveys of the Central Statistical Office with Regard to*

- Rice Agriculture, Particularly in Java/Bali*. Yogyakarta: Gadjah Mada University USAID, and Boston University (paper tidak diterbitkan).
- Cheetham, Russell J. dan Peters, Jr. R. Kyle. 1991. "Poverty Reduction during the New Order Government", paper presented at *The Colloquium on Poverty and Development in Indonesia*. Netherlands.
- Collier, William L. 1977. *Agricultural Evolution in Java: the Decline of Shared Poverty*. Paper tidak diterbitkan.
- De Vries. 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa* (translation). Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1991. *The Growth of Rural Non-Farm Activities at the Local Level: a Case Study of Causes and Effects in a Subdistrict of Upland Central Java*, Thesis Submitted for Degree of Doctor of Philosophy, Discipline of Geography, School of Social Sciences, The Flinders University of South Australia, Adelaide.
- Effendi, Tadjuddin Noer dan Helmut Weber. 1993. "Keterintegrasian dan Prospek Perkembangan Industri Pedesaan: Studi Kasus di Dua Desa di Klaten dan Gunung Kidul", paper disampaikan dalam *Seminar Bulanan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.
- Ellis, G. F. R. 1984. "The Dimensions of Poverty", *Social Indicator Research*, hlm. 229-153.
- Friedmann, John. 1981. "Kemiskinan Urban di Amerika Latin" dalam *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Andre Bayo Ala. Yogyakarta: Liberty.
- Geertz, Clifford. 1974. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hart, Gillian. 1986. *Power, Labor and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. Berkeley: University of California Press.
- Hara, Y. 1981. "Off-farm Employment in Economic Development: Some Theoretical Considerations", paper presented to *An International Seminar Off-farm Employment and Rural industrialization*. Tokyo: FFTC/ASPAC.
- Hartoyo, Sri. 1980. *Penggunaan Sumber Daya, Lembaga Pelayanan dan Potensi Pembangunan di Daerah Persawahan Pegunungan dan Daerah Pantai Jawa Timur*. Bogor: Studi Dinamika Pedesaan, Survei Agro Ekonomi.
- Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hugo, Graeme J. 1978. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Husken, Frans. 1989. "Cycle of Commercialization and Accumulation in a Central Javanese Village" dalam *Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia*, Gillian Hart et al. (eds). London: University of California Press, hlm. 303-331.
- Jones, Gavin. 1984. "Links between Urbanization and Sectoral Shifts in Employment in Java", *BIES*, 20(3): 120-157.
- Khada, Ryohei. 1986. "Off-farm Employment and The Rural-urban Interface in Japanese Economic Development", dalam *Off-farm Employment in The Development of Rural Asia*, R.T Shand (eds). Canberra: Australian National University, hlm. 75-94.

- Kolff, Van Der G. H. 1936. *The Historical Development of the Labour Relationship in a Remote Corner of Java as They Apply to the Cultivation of Rice*. Netherland: National Council for the Netherlands and the Netherlands Indies of the Institute of Pacific Relations.
- Manning, Chris. 1985. *A Food Production Success Story: the Case of Rice Sufficiency in Indonesia*. Adelaide: Flinders University, Asian Studies. (paper tidak diterbitkan).
- Manning, Chris. 1986. *The Green Revolution, Labour Displacement, Incomes and Wealth in Rural Java: a Reassessment of Trends during the Soebarto Era*. Adelaide: Flinders University. Paper tidak diterbitkan.
- Manning, Chris. 1988. *The Green Revolution, Employment, and Economic Change in Rural Java: a Reassessment of Trends under the New Order*. Pasir Panjang, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mantra, Ida Bagoes. 1981. "Circular Mobility in Yogyakarta Special Region: a Case Study of Two Dukuh", dalam *Population Mobility and Development: Southeast Asia and the Pacific*, Govin W. Jones and H.V. Richter (eds). Canberra: Australian National University.
- Mather, Celia E. 1983. "Industrialization in the Tangerang Regency of West Java", *Indonesia*, 15(2): 2-7.
- Maurer, Jean L. "Agricultural Modernization and Social Change: the Case of Java the Last Fifteen Years", *Masyarakat Indonesia*, 1(2): 109-119.
- Oey, Mayling. 1985. "Changing Work Patterns of Women in Indonesia during the 1970s: Causes and Consequences", *Prisma*, 37: 18-46.
- Penny, D. H. 1990. *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Schrevel, Aart. 1989. "Akses atas Tanah sebagai Indikator Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan", *Prisma*, 4(18): 38-51.
- Singarimbun, Masri dan D. H. Penny. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Singarimbun, Masri. 1990. "Perubahan-perubahan Sosial-Ekonomi di Miri Sriharjo (1989)", dalam *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*, D.H. Penny. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 169-176.
- Saefuddin, Jusuf dan Yuni Marisa. 1984. *Perubahan Pendapatan dan Kesempatan Kerja*. Bogor: Studi Dinamika Pedesaan, Yayasan Penelitian Survei Agro Ekonomi.
- Sayogyo. 1978. "Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa", *Prisma*, 3: 3-14.
- Suyono, Irlan dan Birowo, A. T. 1976. "Distribusi Pendapatan di Pedesaan Padi Sawah di Jawa Tengah", *Prisma*, 1(2): 26-32.
- White, Benyamin. 1986. *Rural Non-Farm Employment in Java: Recent Developments, Policy Issues and Research Needs*. Institute of Social Studies-UNDP/ILO.
- White, Benyamin. dan Gunawan Wiradi. 1989. "Agrarian and Nonagrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages" dalam *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*. Gillian Hart et al. (eds). London: University of California Press.
- World Bank. 1985. *Indonesia: Policies for Growth and Employment (Part II): Employment Trends and Outlook*, Report No. 5597. IND, Washington, hlm. 66-171.